

SKRIPSI

UMAT ISLAM MELAYU PATANI DAN RESOLUSI KONFLIK STUDI: KASUS PERAN TUAN GURU HAJI SULONG

Dosen Pembimbing I:
Prof. Dr.phil. Saiful Akmal, M.A.
NIP: 198203012008011006

Dosen Pembimbing II:
Danil Akbar Taqwaddin, M.Sc., Ph.D
NIDIN: 2008048903



Diajukan Oleh:

MR. SAHEED HAWEE
(190801068)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M./1447 H.**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mr. Saheed Haweee
NIM : 190801068
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan Ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 28 April 2026

Menyatakan

AR - R



METERAN
TEMPER
FE 036ANX323051895

MR. Saheed Hawee
NIM:190801068

**UMAT ISLAM MELAYU PATANI DAN RESOLUSI KONFLIK
STUDI: KASUS PERAN TUAN GURU HAJI SULONG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh:

MR. SAHEED HAWEE


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik
NIM: 190801068

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. phil. Saiful Akmal, M.A.
NIP: 198203012008011006

Pembimbing II


Danil Akbar Taqwaddin, M.Sc., Ph.D
NIP: 198904082023211022

**UMAT ISLAM MELAYU PATANI DAN RESOLUSI KONFLIK
STUDI: KASUS PERAN TUAN GURU HAJI SULONG**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

MR. SAHEED HAWEE
NIM : 190801068


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026 M.
26 Dhzul Qa,dah 1447 H


Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

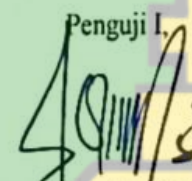
Sekretaris,

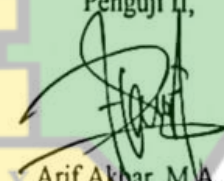

Prof. Dr. phil. Saiful Akmal, M.A.
NIP. 198203012008011006


Danil Akbar Taqwadin, B.I.A.M., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198904082023211022

Penguji I,

Penguji II,


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP. 198605132019031006


Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry
Darussalam-Banda Aceh




Prof. Dr. Asyraf Mulla, S.Ag., M.Ag.
NIP. 7403271999031005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَالِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, Shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita yakni Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan dan sampailah kita pada saat ini ke alam yang penuh dengan nikmat ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul: **“UMAT ISLAM MELAYU PATANI DAN RESOLUSI KONFLIK STUDI: KASUS PERAN TUAN GURU HAJI SULONG”**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan Tugas Akhir dan untuk menambah wawasan saya dan pembaca dalam bidang mengenai bagaimana hak politik narapidana di Aceh. penelitian ini telah penulis susun dengan semaksimal mungkin. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesempurnaan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dikarenakan keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, motivasi, tenaga maupun do'a dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta menyisihkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Segenap dosen beserta staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan pembelajaran semasa perkuliahan dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa, terimakasih banyak kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Basiron M.Amin dan Andian Bustami yang selalu penulis cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendo'akan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, selalu memberikan semangat, nasihat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kakak dan Adik saya tercinta *my sweetest siblings* Janiar Rizki Basdian dan Umam Hafid yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta selalu mendukung penulis dalam segala kondisi untuk selalu menjadi seseorang yang lebih baik lagi setiap harinya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa juga kepada Keluarga saya terkasih Kakek Bustami M.Amin Budih, Nenek Ti Hajar M.Ali, Buk Mola dan Mimad yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam susah maupun senang,

nasihat serta dukungannya yang tiada lelahnya untuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.

8. Sahabat seperjuangan saya, Irdianti Dewi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada lelah untuk penulis setiap harinya, selalu mengusahakan menjadi seorang teman yang selalu ada untuk penulis dan selalu menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Ine dan Ama yang telah memberikan semangat serta motivasinya kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan kontribusi dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun yang penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua para pembacanya agar bisa menjadi referensi dan juga bisa bermanfaat terutama bagi penulis akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan kebaikan, serta melindungi dan selalu meridhai kita semua.

Aamiin Ya Rabbal ,,Alamin....

Banda Aceh, 28 April 2026
Penulis

MR. SAHEED HAWEE
NIM. 190801068

ABSTRAK

UMAT ISLAM MELAYU PATANI DAN RESOLUSI KONFLIK: STUDI KASUS PERAN TUAN GURU HAJI SULONG

Nama Mahasiswa / NIM : Mr. Saheed Hawee/190801068
Program Studi : Ilmu Politik
Topik : Resolusi Konflik
Tanggal Pengajuan : 13 Agustus 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji biografi intelektual Syaikh Haji Sulong (1895-1954) melalui perannya dalam jaringan keilmuan ulama Melayu lintas Selat, terutama dalam penguatan identitas Islam Melayu dan respons terhadap tekanan politik negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, skripsi, dan dokumen sejarah yang relevan dengan sejarah Patani, ulama Melayu, dan dinamika sosial-keislaman di Thailand selatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, dan interpretasi literatur dengan pendekatan historis-analitis untuk menelusuri proses pembentukan intelektual, jaringan keilmuan, serta praksis dakwah dan pendidikan Haji Sulong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keulamaan Syaikh Haji Sulong dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan keluarga ulama, tradisi pendidikan pondok Patani, serta pengalaman intelektual transnasional di Haramain. Ketiga unsur tersebut disintesis dalam aktivitas dakwah, pengajaran, dan pembaruan pendidikan Islam melalui pendirian madrasah modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Jaringan keilmuan yang dimilikinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai basis legitimasi sosial, kepemimpinan moral, dan advokasi kultural dalam menghadapi marginalisasi politik terhadap masyarakat Muslim Melayu Patani. Haji Sulong tampil sebagai figur sentral dalam jaringan ulama Melayu lintas Selat sekaligus simbol perlawanan intelektual berbasis keilmuan yang menegaskan peran ulama sebagai agen transformasi sosial dan penjaga identitas kolektif umat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Latar Sejarah dan Identitas Patani.....	3
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Manfaat yang diharapkan.....	8
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Resolusi Konflik	15
2.3 Sejarah Konflik Patani dengan Siam (Thailand)	24
2.4 Profil Tuan Guru Haji Sulong.....	31
2.5 Faktor-faktor Perkembangan Nasionailisme di Patani	34
BAB III: METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Runtuhnya Kesultanan Melayu Patani	41
4.2 Peran dan Perjuangan haji sulong dalam resolusi konflik di Patani	44
4.3 Implikasi atau Dampak Langkah Proses Perjuangan Damai di Patani terhadap Proses Resolusi Konflik Kerajaan Thailand.....	51
BAB V KESIMPULAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nasionalisme merupakan suatu pemikiran dan tindakan yang menunjukkan cinta terhadap bangsa dan negara serta kesadaran nasional yang meliputi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan keagamaan bahkan ingin keluar dari suatu penguasaan asing dalam mengekalkan identitas juga nilai-nilai kebangsaan. Sungguhpun cengkaman penjajahan Siam (Thailand) ke atas negeri Melayu Patani di (Selatan Thailand) mencapai usia 241 tahun tetapi gelaran Nasionalisme moden Islam Patani hanya wujud selepas berakhirnya perang dunia 2. Walaupun nasionalisme wujud dengan seriusnya di Asia Tenggara dalam Abad ke 20 ini namun semangat patriotisme telah lama terpendam.

Sekarang telah menjadi Provinsi Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Provinsi Songkla di Selatan Thailand. Tambahan pula masyarakat Islam berketurunan Melayu di wilayah-wilayah Patani (Selatan Thailand) merasakan kehilangan hak-hak politik dan pentadbirian secara menyeluruh bersama dengan perbezaan ciri-ciri Penghidupan masyarakat Islam. 85% dari pada jumlah penduduk wilayah berkenaan telah dicabar dengan tekanan hebat oleh unsur-unsur Siam (Thailand) dan agama Buddha. Seajar dengan pencapaian arus kemerdekaan di kalangan penduduk di negara-negara Asia Tenggara yang sedang memuncak telah memberikan aspirasi baru kepada golongan Nasionalisme.

Umat Islam keturunan Melayu peribumi di Tanah Melayu dan Indonesia menentang penjajah Inggris dan Belanda. Semangat Nasionalisme Islam ini telah

menular masuk dan mempengaruhi para pemimpin masyarakat Islam di Wilayah-wilayah Patani (Selatan Thailand) di bawah belunggu penjajahan Kafir Siam (Thailand).¹

Wilayah Patani yang kini terletak dalam sempadan selatan Thailand merupakan tanah air bagi komuniti Melayu Islam yang mempunyai sejarah panjang, budaya tersendiri, dan identiti keagamaan yang kukuh. Namun sejak pengilhakan wilayah ini oleh Siam pada awal abad ke-20, masyarakat Melayu Islam Patani telah melalui pelbagai bentuk penindasan, diskriminasi, dan konflik yang berpanjangan.² Dalam suasana konflik dan tekanan ini, urusan sosial seperti kehidupan yang sepatutnya menjadi hal peribadi dan suci—turut terkesan. Soal kehidupan bukan sekadar hanya individu, tetapi mencerminkan perjuangan mempertahankan identiti, kepercayaan, dan kesinambungan budaya.

Tambahan pula, tekanan dari dasar asimilasi dan sekularisasi negara telah mengubah corak pilihan dalam kehidupan dan hubungan dalam masyarakat Melayu Patani. Tokoh seperti Tuan Haji Sulong muncul sebagai simbol perjuangan untuk mempertahankan agama dan hak Melayu Islam Patani. Perjuangannya bukan sahaja bersifat politik, tetapi turut membentuk cara masyarakat melihat diri, agama, dan masa depan mereka termasuk dalam hal-hal kehidupan dan masa depan masyarakat.³

¹ REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Kamis 23 Mar 2017 18:15 WIB

² Adi Yasran Abdul Aziz (2010). "Inventori Vokal Dialek Melayu Kelantan: Satu Penilaian Semula". *Jurnal Linguistik (in Malay)*. 11: 1–19. Archived from the original on 15 July 2024

³ The Federation of Patani Students and Youth (PerMAS), <http://www.turanisia.com/declaration-thai-states-conduct-continuation-human-rights-violations-prejudices-discrimination-towards-people-patani/> diunduh 20 Oktober 2016

Perjuangan mempertahankan jati diri dan agama tidak dapat dipisahkan dari pada institusi kebersamaan dan kehidupan. Dalam konteks masyarakat Melayu Patani, kehidupan rayat dilihat bukan sahaja sebagai kehidupan untuk semta-mata hidup, tetapi juga sebagai perisai kepada kelangsungan budaya Islam dan Melayu yang kini semakin terhakis di bawah tekanan dasar nasionalisme Thai.⁴

Situasi ini menjadi lebih rumit apabila generasi muda terpaksa berdepan dengan dilema antara kekal dengan tradisi atau menyesuaikan diri demi kelangsungan hidup. Pemilihan pasangan hidup menjadi pergelutan antara nilai agama, kehendak keluarga, dan tekanan sosial-politik sekeliling. Dalam banyak kes, kehidupan bukan lagi semata-mata soal kesenangan, tetapi juga soal kelangsungan identiti dan perjuangan.⁵

1.2 Latar Sejarah dan Identitas PATANI

Pada awalnya, Patani merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdaulat, mempunyai kesultanan dan perlembagaan yang tersendiri. Patani adalah sebagian dari “Tanah Melayu”. Namun pada pertengahan abad ke-19 Patani telah menjadi korban penaklukan Kerajaan Siam (Thailand). Pada tahun 1826, penaklukan Siam (Thailand) terhadap Patani mendapat pengakuan Britania Raya. Dalam usahanya untuk mengokohkan kedudukannya di Patani, pada tahun 1902 Kerajaan Siam (Thailand) melaksanakan Undang-undang Thesaphiban. Dengan itu, sistem pemerintahan kesultanan Melayu telah dihapuskan. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bangkok pada tahun 1909, Patani telah diakui oleh

⁴ Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 1(1),1–15. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.438> 2018-01-04

⁵ World Bulletin, <http://jurnalislam.com/2016/10/17/ormas-islam-thailand-kecam-penangkapan-48-mahasiswa-muslim-polisi-bangkok/> diunduh 18 Oktober 2016

Britania sebagai bagian dari jajahan Siam (Thailand) walaupun tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli Melayu Patani.

Sejak penghapusan pemerintahan Kesultanan Melayu Patani, masyarakat Melayu-Patani berada dalam posisi tertekan dan lemah. Seperti yang diungkap oleh W.A.R. Wood, Konsul Britania di Songkhla, penduduk Melayu telah menjadi mangsa sebuah pemerintahan yang tidak diperintah dengan baik. Justru akibat pemaksaan inilah kekacauan sering terjadi di Pattani. Pada tahun 1923, Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, mantan Raja Melayu Patani, dengan dukungan pejuang-pejuang Turki, memimpin gerakan pembebasan. Semangat anti-Siam menjadi lebih hebat saat Kerajaan Pibul Songgram (1939-44) mencoba mengasimilasikan kaum minoritas Melayu ke dalam masyarakat Siam melalui Undang-undang Rathaniyom. Sekarang telah menjadi Provinsi Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Provinsi Songkla di Selatan Thailand.⁶

Keterlibatan Siam dalam Perang Dunia Kedua di pihak Jepang telah memberikan harapan kepada orang-orang Melayu Pattani untuk membebaskan tanah air mereka dari penjajahan Siam. Tengku Mahmood Mahyideen, putra mantan Raja Melayu Patani juga seorang pegawai berpangkat Mayor dalam pasukan Force 136, telah mengajukan proposal kepada pihak berkuasa Britania di India supaya mengambil alih Patani dan wilayah sekitarnya serta digabungkan dengan Tanah Melayu. Proposal Tengku Mahmud itu selaras dengan proposal Pejabat Tanah Jajahan Britania dalam mengkaji kedudukan tanah ismus Kra dari sudut kepentingan keamanan Tanah Melayu setelah perang nanti. Harapan itu

⁶ The Federation of Patani Students and Youth (PerMAS), <http://www.turanisia.com/declaration-thai-states-conduct-continuation-human-rights-violations-prejudices-discrimination-towards-people-patani/> diunduh 20 Oktober 2016.

semakin terbuka saat pihak sekutu, dalam Perjanjian San Francisco pada bulan April 1945, menerima prinsip hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) sebagai usaha membebaskan tanah jajahan dari belenggu penjajahan.⁷

Atas semangat itu, pada 1 November 1945, sekumpulan pemimpin Melayu Patani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalal, bekas wakil rakyat wilayah Narathiwat, telah mengemukakan petisi kepada Kerajaan Britania dengan tujuan membujuk agar empat wilayah di Selatan Siam dibebaskan dari kekuasaan Pemerintahan Siam dan digabungkan dengan Semenanjung Tanah Melayu. Namun sudut pandang Britania terhadap Siam berubah saat Peperangan Pasifik selesai. Keselamatan tanah jajahan dan kepentingan British di Asia Tenggara menjadi pertimbangan utama kerajaan Britania dalam perbincangannya dengan Siam maupun Pattani. Kerajaan Britania memerlukan kerjasama Siam untuk mendapatkan stok beras untuk keperluan tanah jajahannya. Tidak kurang pentingnya, kerajaan Britania terpaksa menyesuaikan perundangannya terhadap Siam dengan tuntutan Amerika Serikat yang ingin menetapkan wilayah Siam seperti pada tahun 1941.⁸

Kebangkitan Komunis di Asia Tenggara, khususnya di Tanah Melayu pada tahun 1948, menjadi faktor pertimbangan Britania dalam menentukan keputusannya. Kerajaan Britania menganggap Siam sebagai negara benteng terhadap ancaman Komunis China. Karena itu Kerajaan Britania ingin

⁷ Skripsi berjudul: Hukum membiarkan non muslim memasuki majid menurut Majelis Agama Islam Patani Atas Nama:Mr Muhammadlu-ai lamatha, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada hari Jum'at, Tanggal 30 Januari 2020

⁸ SEJARAH DAN KONDISI TERKINI UMAT MELAYU MUSLIM DI PATANI. Oleh : **Turanisia.Com**, Abu Muhammad Faton, 15 September 2016

memastikan Siam terus stabil dan memihak kepada Barat dalam persaingan dengan Negara-Negara Komunis. Kerajaan Britania memerlukan kerjasama kerajaan Siam untuk menghapuskan kegiatan teror Komunis di perbatasan Tanah Melayu-Siam. Kebetulan kerajaan Siam telah memberi jaminan untuk memperkenalkan reformasi di Pattani untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Melayu. Oleh kerana itu, isu Pattani yang awalnya dianggap kurang penting malah kembali dibangkitkan akan memperkuat hubungan dengan Siam.

Setelah Persidangan Songkla pada awal Januari 1949, pihak berkuasa Britania di Tanah Melayu atas tuntutan pihak Siam mulai mengambil tindakan terhadap pemimpin-pemimpin perjuangan Pattani. GEMPAR juga telah dilarang. Tengku Mahmood Mahyideen ditekan, sementara Haji Sulung dihukum penjara. Pergerakan politik Pattani semakin lemah dengan kematian Tengku Mahmood Mahyideen dan Haji Sulung pada tahun 1954.⁹

Identitas Melayu Patani yang dipelihara oleh sejumlah pranata seperti pranata pendidikan yang tercermin dari sekolah-sekolah agama yang disebut pondok dan berpusat di dalam institusi keluarga, masjid, serta pondok itu sendiri. Bahasa, kebiasaan (tradisi dan adat-istiadat), terlebih-lebih keyakinan agama adalah merupakan identitas baku dan asli (original identity) yang cenderung bersifat statis dan menetap dari Melayu Muslim Patani. Identitas ini menjadi bagian dari sistem kepribadian atau pola perilaku sehari-hari yang bersifat ajeg. Menyitir Geertz, ikatan-ikatan primordial sebagai sumber identitas kelompok etnik tertentu mengandung nilai-nilai kesejarahan (ascriptive) yang dibentuk

⁹ Sejarah Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) Thailand selatan pada tahun 2008-2017

dalam tempo relatif panjang, kemungkinan semenjak adanya bangsa Melayu Patani itu sendiri, dan semenjak kedatangan Islam. Identitas Patani merupakan sinkretisme antara “Melayu” sebagai varian lokal dengan tradisi “Islam”. Integrasi Patani ke dalam nation-state Thai membawa pengorbanan dan pengikisan identitas (budaya Melayu dan agama Islam) Patani.¹⁰

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Tuan Guru H. Sulong dan Resolusi Konflik di Patani?
2. Apa implikasi atau dampak langkah proses perjuangan damai di Patani terhadap proses resolusi konflik kerajaan Thailand?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Tuan Guru H. Sulong dan Resolusi Konflik.
2. Untuk mengetahui implikasi atau dampak langkah proses perjuangan damai di Patani terhadap proses resolusi konflik kerajaan Thailand.

1.5 Metode Penelitian

Penulis berharap semoga hasil dari penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari kajian pustaka, studi literatur, situs-situs internet, terbitan institusi, jurnal, artikel dari buku-buku serta surat kabar dalam periode tersebut dari tahun 2015 sampai tahun 2025.

¹⁰ Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No.1 Tahun 2017

1.6 Manfaat yang diharapkan

Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai referensi tentang Umat Islam Melayu Patani dan Resolusi Konflik di Patani sebagai pengetahuan Bagi penulis sendiri.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat luar negeri yang berkaitan dengan Umat Islam Melayu Patani dan Resolusi Konflik di Patani dan penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang dan dikembangkan oleh pihak-pihak lain yang berminat terhadap permasalahan yang penulis yang teliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah suatu uraian yang berkaitan dengan teori, konsep serta temuan maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian serta penulisan pembahasan ini. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan pandangan terhadap suatu pembahasan dan untuk dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Abdulbasit Chetae dan Agus Fiadi dalam artikel yang terbit tahun 2020 berjudul (“Runtuhnya Kesultanan Patani dan Dampaknya bagi Masyarakat Patani pada Abab 20”). Artikel ini menjelaskan perjuangan masyarakat melayu Patani melawan usaha pengintegrasian pemerintahan Thailand Rumusan masalah dalam penelitian ini; faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jatuhnya Kesultanan Patani, apa saja kebijakan Siam (Pemerintahan Thailand) terhadap umat Islam Patani dan bagaimana kondisi umat Islam Patani dibawah Rezim pemerintahan Thailand. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode historis. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Jatuhnya Kesultanan Patani disebabkan tidak ada pengganti yang cocok., Kedua, kesepakatan perjanjian perbatasan antara Inggris dan Thailand, Patani Raya mmenjadi bagian integrasi Pemerintahan Thailand. Ketiga, masyarakat Patani menuntut otonomi seperti di bidang ekonomi, budaya, Pendidikan, dan

agama, yang dipimpin oleh seorang ulama bernama H. Sulong. Dan langkah yang paling penting adalah bergerak dengan nama Gabungan Melayu Patani Raya (GEMPAR). Bagi masyarakat Melayu Patani tidak pernah merasa sebagai bagian dari bangsa Thai. Oleh karena itu, mereka tidak ingin diatur oleh Bangkok, mereka ingin mengatur diri mereka sendiri.¹¹

Mr. Furkon Chemaie dalam artikel yang terbit tahun 2017 berjudul (“Gerakan Perlawanan Patani United Liberation Organization (PULO) terhadap Pemerintahan Thailand tahun 1968-1980”). Penelitian ini mengangkat judul tentang Gerakan Perlawanan Patani United Liberation Organization (PULO), dikarenakan PULO merupakan organisasi yang populer diseluruh negeri Thailand bahkan pemerintah Thailand memandang bahwa gerakan PULO sudah bertaraf internasional dan PULO juga adalah organisasi perjuangan terbesar di Thailand hingga saat ini. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya PULO, bagaimana gerakan perlawanan yang dilakukan PULO terhadap Pemerintah Thailand dan apa saja yang telah di capai dalam periode tahun 1968 hingga 1980. Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi dibentuknya PULO, perlawanannya, serta capaian yang telah diraih oleh PULO. gerakan-gerakan

Dalam melakukan penelitian ini digunakan teori konflik dengan metode historis yang melalui empat tahap yaitu pertama Heuristik, yaitu pengumpulan sumber baik tertulis maupun lisan. Pada tahap ini terdapat dua teknik

¹¹ Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol 2. No.2 Juli 2020.

pengumpulan data yaitu: studi dokumentasi dan wawancara. 2) Verifikasi, yaitu mencari keaslian sumber. Kritik sumber ada dua yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern untuk menilai wujud fisik sedangkan kritik intern untuk menilai isi sumber. 3) interpretasi, yaitu usaha menafsirkan fakta melalui analisis dan sintesis. 4) Historiografi, yaitu penulisan sejarah yang bertujuan merangkai fakta menjadi penjelasan sejarah yang mudah dipahami.¹²

Mr. Maduenan Wae-Uma dalam artikel yang terbit tahun 2019 (“Peran Haji Sulong terhadap Pendidikan dan Politik di Patani (Thailand Selatan) tahun 1927-1954 M.”). Masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan sering terpinggirkan dalam beberapa aspek sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. Di tengah situasi dan kondisi ini, muncullah Haji Sulong yang membangkitkan semangat masyarakat Melayu Patani. Bisa dikatakan bahwa Haji Sulong adalah pelopor pertama gerakan perubahan pendidikan dan politik di Patani. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peranan Haji Sulong dalam wilayah pendidikan dan politik di Patani. Pertanyaan penelitian ini adalah mengenai latar belakang keluarga dan pendidikan Haji Sulong, peran Haji Sulong terhadap pendidikan dan politik di Patani, dan respon masyarakat Melayu Patani dan pemerintah Thailand terhadap peran pendidikan dan politik Haji Sulong. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, menggunakan pendekatan biografi dan sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan sosial yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Peranan sosial adalah salah satu konsep sosiologi yang paling sentral yang didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma perilaku yang

¹² Skripsi Mr. Furkon Chemaie (2017) (“Gerakan Perlawanan Patani United Liberation Organization (PULO) terhadap Pemerintahan Thailand tahun 1968-1980”)

diterapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat langkah yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Haji Sulong lahir di Kampung Anak Ru Patani. Ia merupakan anak dari Haji Abdul Kadir dan Syarifah. Haji Sulong menikah pertama kali dengan Syafiah dan kedua dengan Khadijah dikaruniai sepuluh orang anak. Pendidikan awal Haji Sulong dengan ayahnya, kemudian belajar di pondok dan melanjutkan di Makkah. Peran Haji Sulong dalam pendidikan di Patani merombak secara besar-besaran sistem pendidikan pondok di Patani lebih sistemik dan terstruktur lagi termasuk pendirian madrasah baru. Peran Haji Sulong dalam perpolitikan, peraturannya adalah tuntutan tujuh perkara yang berupaya menuntut kesetaraan dan otonomi khusus bagi warga Melayu muslim Patani.

Respon masyarakat Patani sendiri terlihat dari perubahan orientasi pendidikan dan respon dalam bidang perpolitikan yakni mereka yang mulai menggunakan pendidikan yang digubah Haji Sulong dan bangkitnya perjuangan kelas mereka untuk bisa mewujudkan Patani sebagai daerah otonomi khusus. Respon lainnya juga terlihat dari munculnya kebangkitan masyarakat Patani yang semakin sadar akan ketertindasan mereka. Kesadaran inilah yang membawa mereka maju membela Haji Sulong juga menjadi cikal bakal terbentuknya GAMPAR sebagai respon dalam perpolitikan Haji Sulong. Pemerintah Thai merespon perjuangan pendidikan Haji Sulong dengan beberapa kali membubarkan madrasah Haji Sulong dan mencampuri kurikulum di sana. Respon pemerintah

Thai atas perpolitikan Haji Sulong berbentuk penindasan pada rakyat Patani karena dianggap berupaya melakukan disintegrasi Patani dari Kerajaan Siam, akhirnya penangkapan Haji Sulong hingga terbunuhnya ia bersama anaknya dan rekan-rekan.¹³

Abdulfatta Jeh-Ngoh dalam artikel yang terbit tahun 2021 berjudul (“Muhammad Bin Abdul Kadir; Perjuangan; Pengabdian”.) Muhammad bin Abdul Kadir bin Zainal Abidin bin Ahmad (Haji Sulong) (1895-1954) termasuk seorang cendekiawan Islam, pemimpin pergerakan Islam dan nasionalisme Melayu bidang pendidikan, agama dan sosio-politik. Ia termasuk juga dalam kelompok ulama yang memimpin reformasi agama dan gerakan nasionalis di Malaya dan Indonesia pada dekade pertama abad ke-20. Di bidang agama, ada dua kegiatan penting yang pernah dilakukan oleh Haji Sulong, yaitu kegiatan mengajar secara berdakwah dan upayanya dalam membela hukum Syariah. Haji Sulong mengajar agama dengan berdakwah di seluruh Pattani.

Setelah melihat dukungan yang mulai tumbuh di masyarakat, barulah Haji Sulong mulai mengenalkan gagasan lembaga pendidikan dalam bentuk modern kepada masyarakat, yaitu Madrasah al-Maarif al-Wataniah dapat berdiri. Perjuangan Haji Sulong dalam bidang politik dengan terlibat dalam perjuangan memperbaiki nasib umat Islam Patani. Sebuah perjuangan yang menyempurnakan karir hidupnya meskipun upaya ini tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand,

¹³ Skripsi Mr. Maduenan Wae-Uma (2019) (“Peran Haji Sulong terhadap Pendidikan dan Politik di Patani (Thailand Selatan) tahun 1927-1954 M.”)

tetapi memberikan kontribusi besar bagi perjuangan umat Islam Patani di masa depan.¹⁴

Ummuaiman Maming dalam artikel yang terbit tahun 2024 berjudul (“Modernisasi Pendidikan Islam Perpektif Ulama Patani: Kajian Pemikiran Haji Sulong 1895-1954”). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep modernisasi pendidikan Islam yang diperkenalkan oleh Haji Sulong di Patani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini mengungkap peran Haji Sulong, seorang ulama kharismatik yang kembali dari Mekah pada tahun 1927 dan membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Islam di Patani. Ia mendirikan Madrasah alMa’arif al-Wathoniyah sebagai madrasah pertama di Patani.

Hasil penelitian yaitu Haji Sulong menggantikan sistem pondok tradisional dengan sistem madrasah modern yang mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu umum. Modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan Haji Sulong mencakup tiga aspek utama: lembaga, kurikulum, dan metode pengajaran. Dampak dari modernisasi ini dirasakan oleh dua pihak utama: masyarakat Muslim-Melayu Patani dan pemerintah Thailand. Bagi masyarakat, modernisasi ini tidak hanya memperkuat identitas keagamaan mereka tetapi juga menjadi sarana untuk menolak asimilasi budaya yang dipaksakan oleh pihak luar. Di sisi lain, pemerintah Thailand memandang upaya ini sebagai peluang untuk mengintegrasikan masyarakat Melayu Patani ke dalam identitas nasional Thai.

¹⁴ Jurnal Abdulfatta Jeh-Ngoh (2021) (“Muhammad Bin Abdul Kadir; Perjuangan; Pengabdian”)

Namun, kebijakan ketat yang diterapkan pemerintah terhadap pengawasan pendidikan Islam di Patani justru mengurangi kualitas pendidikan tradisional dan memperburuk ketegangan antara masyarakat Melayu Patani dan pemerintah Thailand. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan yang diusung Haji Sulong berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya dan agama masyarakat Patani di tengah tekanan asimilasi yang kuat.¹⁵

2.2 Resolusi Konflik

2.1.1 Pengetian Resolusi Konflik

Mengutip buku *Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek*, resolusi konflik adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif. Resolusi konflik bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Sementara itu, resolusi konflik berfokus untuk mengurangi ketegangan, mempromosikan komunikasi yang efektif, serta mencari solusi yang adil pada tiap masalah yang timbul.

1. Menurut Ralf Dahrendorf ada 3 bentuk resolusi konflik.
 - a. Konsiliasi, yakni pengendalian konflik dengan cara semua pihak yang terlibat berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang memaksa atau memonopoli pembicaraan.

¹⁵ Skripsi Ummuaiman Maming (2024) (“Modernisasi Pendidikan Islam Perpektif Ulama Patani : Kajian Pemikiran Haji Sulong 1895-1954”)

- b. Mediasi, yakni upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator, yang memberi nasihat atau saran, tetapi bukan pemberi keputusan.
 - c. Arbitrasi, yakni resolusi konflik dengan kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik.¹⁶
2. Menurut William Ury, resolusi konflik bisa dilakukan dalam tiga bentuk langkah. Ketiganya ialah sebagai berikut:
- a. Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak) agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi makin besar dan sulit untuk diselesaikan.
 - b. Segera menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan. Resolusi dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini, akan menutup kemungkinan proses menguatnya konflik.
 - c. Mencegah potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif.¹⁷
3. Menurut Johan Galtung, terdapat beberapa bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Galtung menawarkan beberapa model resolusi konflik, yakni *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*.

Ketiga model resolusi konflik yang ditawarkan Galtung itu memiliki dimensi dan target yang tidak sama. Akan tetapi, rangkaian pelaksanaan ketiga

¹⁶ artikel terkait KONFLIK SOSIAL atau tulisan lainnya dari Versatile Holiday Lado 2021

¹⁷ artikel terkait KONFLIK SOSIAL atau tulisan lainnya dari Versatile Holiday Lado 2021

model itu sama-sama memiliki tujuan akhir berupa mewujudkan perdamaian jangka *panjang*.

Peacemaking ialah sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian pada tahap awal, atau sebelum konflik semakin besar. Sementara *peacekeeping* adalah menerapkan perjanjian perdamaian untuk menjaga perdamaian.

Tahap selanjutnya, *peacebuilding*, yaitu membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. *Peacebuilding* merupakan proses yang berjalan jangka panjang memperkuat elemen pemersatu semua pihak dalam formasi baru dan bertahan lama.¹⁸

Berdasarkan tahap-tahap penyelesaian konflik diatas, dalam tahap *peacemaking dan peacebuilding* yaitu Haji Sulong menggantikan sistem pondok tradisional dengan sistem madrasah modern yang mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu umum. Modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan Haji Sulong mencakup tiga aspek utama: lembaga, kurikulum, dan metode pengajaran. Dampak dari modernisasi ini dirasakan oleh dua pihak utama: masyarakat Muslim-Melayu Patani dan pemerintah Thailand. Bagi masyarakat, modernisasi ini tidak hanya memperkuat identitas keagamaan mereka tetapi juga menjadi sarana untuk menolak asimilasi budaya yang dipaksakan oleh pihak luar. Di sisi lain, pemerintah Thailand memandang upaya ini sebagai peluang untuk mengintegrasikan masyarakat Melayu Patani ke dalam identitas nasional Thai. Namun, kebijakan ketat yang diterapkan pemerintah terhadap pengawasan

¹⁸ artikel terkait KONFLIK SOSIAL atau tulisan lainnya dari Versatile Holiday Lado 2021

pendidikan Islam di Patani justru mengurangi kualitas pendidikan tradisional dan memperburuk ketegangan antara masyarakat Melayu Patani dan pemerintah Thailand. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan yang diusung Haji Sulong berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya dan agama masyarakat Patani di tengah tekanan asimilasi yang kuat.¹⁹

Tahap *peacekeeping* yaitu Aspirasi masyarakat melayu Patani terealisasi dalam sebuah kesepakatan pada tanggal 3 April 1947, golongan melayu muslim Patani di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan rencana tujuh tuntutan tentang pembentukan otonomi daerah kepada pemerintah Thai. Rencana itu mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upaya untuk mempertahankan kemandirian dan kemurnian Islam.²⁰

2.1.2 Metode Resolusi Konflik

Resolusi konflik telah menjadi kunci dalam meredakan ketegangan antar komponen sosial di tengah masyarakat. Berikut ini adalah beberapa metode dalam mewujudkan resolusi konflik.²¹

a. Penyelesaian oleh Pihak yang Terlibat

Metode pertama adalah penyelesaian oleh pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Langkah ini melibatkan komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak yang terlibat harus bersedia mendengarkan satu sama lain, mencoba

¹⁹ Skripsi Ummuaiman Maming (2024) (“Modernisasi Pendidikan Islam Perpektif Ulama Patani : Kajian Pemikiran Haji Sulong 1895-1954”)

²⁰ Skripsi Ummuaiman Maming (2024) (“Modernisasi Pendidikan Islam Perpektif Ulama Patani : Kajian Pemikiran Haji Sulong 1895-1954”)

²¹ Tirto.id [Shulfi Ana Helmi](#) Terbit 4 May 2021

memahami perspektif masing-masing, dan bekerja sama untuk menemukan jalan keluar.²²

b. Intervensi Pihak Ketiga

Ketika penyelesaian oleh pihak yang terlibat tidak memungkinkan atau mengalami kebuntuan, intervensi pihak ketiga dapat diperlukan. Pihak ketiga bisa berupa mediator atau fasilitator yang membantu memediasi konflik dan mengarahkan proses resolusi.²³

c. Penyelesaian Pengadilan

Metode lain adalah penyelesaian pengadilan, yang melibatkan proses hukum untuk menyelesaikan konflik. Cara ini cocok untuk menyelesaikan konflik yang bersifat hukum, seperti permasalahan kontrak, sengketa properti, atau pelanggaran hukum lainnya. Prosesnya sendiri melibatkan pengadilan dan putusan hakim.²⁴

e. Penyelesaian Administrasi

Penyelesaian administrasi adalah metode yang biasanya digunakan untuk konflik di lingkungan organisasi atau perusahaan. Hal ini melibatkan penanganan konflik oleh manajemen atau tim yang ditunjuk untuk mengatasi masalah internal dalam organisasi.²⁵

f. Resolusi Penyelesaian Alternatif

Resolusi konflik alternatif mencakup beberapa metode, seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi melibatkan mediator yang membantu pihak yang bersengketa

²² buku Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek

²³ buku Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek

²⁴ buku Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek

²⁵ buku Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek

untuk mencapai kesepakatan, sedangkan arbitrase melibatkan arbiter yang mengambil keputusan yang mengikat bagi pihak yang bersengketa. Demikian pembahasan mengenai pengertian resolusi konflik beserta metode penerapannya.²⁶

2.1.3 Jenis-jenis Konflik

a. Konsiliasi

Rekonsiliasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik, permusuhan, dan rasa saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Dalam rekonsiliasi, pihak yang berkonflik diharapkan mampu menimbulkan situasi saling melupakan dan saling memaafkan atas peristiwa konflik yang terjadi. Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan melalui penguatan modal sosial (*social capital*) yang dimulai dari membangun modal sosial utama yakni kepercayaan (*trust*) antar masyarakat.

Dalam konteks ini, Perusahaan dapat menyelesaikan atau menghindari konflik dengan cara membangun kepercayaan di antara para stakeholder khususnya masyarakat. Ketika kepercayaan sudah terbangun, maka konflik akan terhindar. Rekonsiliasi dapat dilakukan oleh perusahaan ketika dihadapkan pada situasi konflik seperti tuntutan mengenai dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Rekonsiliasi tidak selalu dilakukan sebagai respons terhadap konflik, sering kali rekonsiliasi ini menjadi strategi proaktif untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat.²⁷

²⁶ buku Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek

²⁷ 2022 All rights reserved. Powered by [Olahkarsa](#).

b. Mediasi

Mediasi adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik melalui proses perundingan atau mufakat dari para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sebagai mediator, tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan mediasi ketika dihadapkan dengan konflik di masyarakat. Misalnya saat menghadapi tuntutan dari masyarakat tentang lapangan kerja maupun dana CSR.²⁸

c. Arbitase

Mirip dengan mediasi, resolusi konflik melalui arbitrase juga menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam arbitrase disebut sebagai arbiter. Seorang arbiter bersifat netral. Berbeda dengan mediator yang hanya memediasi dan memberikan nasihat, arbiter memiliki wewenang untuk memilih salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik. Dalam proses arbitrase, Arbiter akan melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Masing-masing pihak tersebut mengemukakan posisinya dalam konflik disertai bukti kesaksian dan dokumen-dokumen yang mendukung. Setelah itu

²⁸ 2022 All rights reserved. Powered by [Olahkarsa](#).

Arbiter secara aktif menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian Arbiter mengumpulkan sejumlah alternatif kemungkinan resolusi konflik dan membahasnya dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Selanjutnya Arbiter memilih salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik dan masing-masing pihak yang terlibat konflik melaksanakan keputusan arbiter.²⁹

d. Negosiasi

Negosiasi adalah proses komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi dapat dilakukan secara formal atau informal, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga.³⁰

e. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada pengadilan. Litigasi berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka di depan hakim. Keputusan atau solusi pengadilan bersifat final dan harus ditaati oleh semua pihak. Pendekatan ini dapat dilakukan sebagai jalan terakhir ketika berbagai pendekatan lain dirasa tidak bisa menyelesaikan konflik.³¹

2.1.4 Resolusi Konflik di ASEAN

a. Konflik Filipina-MNLF

²⁹ 2022 All rights reserved. Powered by [Olahkarsa](#).

³⁰ 2022 All rights reserved. Powered by [Olahkarsa](#).

³¹ 2022 All rights reserved. Powered by [Olahkarsa](#).

Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Filipina dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF) telah berlangsung dalam periode 1976-2013. Indonesia dibantu Organisasi Konferensi Islam (OKI) mencari solusi tuntutan merdeka pada 1976. Periode 1993-1996 Indonesia berhasil memediasi kedua pihak tersebut mencapai kesepakatan damai. Indonesia terus menjalankan perannya sebagai pengawas pelaksanaan perjanjian, hingga mengirimkan Tim Pengamat Indonesia untuk memonitor masalah ini pada 2012.³²

b. Konflik Vietnam-Kamboja

Indonesia kembali menjadi inisiator penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja pada 1988-1989 melalui Jakarta Informal Meeting (JIM). Kedua negara berkonflik ini berhasil difasilitasi dan dimediasi, hingga Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja. Indonesia juga mengirim 3.957 personil militer ke Kamboja saat terjadi transisi pemerintahan.³³

c. Konflik Thailand-Kamboja

Indonesia kembali menjadi mediator perdamaian dalam konflik wilayah antara Thailand dan Kamboja pada 2011. Indonesia memainkan peranan penting sebagai ketua ASEAN saat itu dengan menciptakan situasi damai dengan dukungan dari Amerika Serikat (AS).³⁴

d. Konflik GAM-Indonesia

Konflik GAM-Indonesia bahwa separatisme Aceh dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan antara

³² Muhammad Reza Ilham Taufani, CNBC Indonesia 05 September 2023 10:25

³³ Muhammad Reza Ilham Taufani, CNBC Indonesia 05 September 2023 10:25

³⁴ Muhammad Reza Ilham Taufani, CNBC Indonesia 05 September 2023 10:25

pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. memulai dan memediasi oleh pihak internasional. Pada tahun tanggal 17 Juli 2005 di Vantaa, Finlandia, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai setelah berunding selama 25 hari. Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik separatisme Aceh. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi Separatisme Aceh, seperti pemberlakuan otonomi khusus, penandatanganan nota kesepakatan Helsinki, dan pembuatan Badan Reintegrasi Aceh (BPR). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penandatanganan nota kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005. Kebijakan ini dinilai cukup efektif untuk mengatasi permasalahan separatisme aceh meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya.³⁵

2.3 Sejarah Konflik Patani dengan Siam (Thailand)

Melayu Patani mengacu pada masyarakat Melayu yang mendiami wilayah Pattani di Thailand Selatan, yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Patani yang independen. Mereka memiliki sejarah panjang dan kaya, serta mempertahankan identitas budaya dan bahasa Melayu mereka, meskipun berada di bawah pemerintahan Thailand. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Melayu Patani:

2.3.1 Sejarah

Kesultanan Patani merupakan kerajaan Melayu yang berdiri di wilayah yang sekarang menjadi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla di Thailand selatan. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17

³⁵ Sejarah dan Perkembangan Konflik Gerakan Separatisme Aceh. (2024). *Sovereignty*, 3(2), 102-107. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/1534>

dan ke-18, namun akhirnya dianeksasi oleh Kerajaan Siam (Thailand) pada awal abad ke-20.³⁶

Di Asia Tenggara, Patani merupakan Beberapa provinsi perbatasan Selatan Thailand yang mempunyai jejak kronologi sejarah yang tragis. Pemergian British di tanah Malaya mewariskan konflik berpanjangan akibat tidak jeli dalam membahagikan wilayah. Pada 10 Maret 1909, British dengan licik telah memisahkan empat wilayah Tanah Melayu untuk menjadi wilayah Siam dengan Perjanjian Anglo-Siamse 1909. Dalam masa yang sama British juga telah memasukkan Negeri Kelantan ke dalam pentadbiran tanah jajahan British.

Tujuan penjajahan ialah menjarah dan merompak harta kekayaan Kelantan. Cara senang kuasa kolonial British mendapat harta kekayaan ialah dengan memaksa rakyat Kelantan membayar cukai. Perjanjian tersebut, dikenal juga sebagai Perjanjian Bangkok 1909, adalah perjanjian antara Inggris dan Thailand pada 1909. Perjanjian ini ditandatangani di Istana Raja Siam di Bangkok pada 10 Maret 1909 dan diratifikasi pada 9 Juli 1909. Perjanjian tersebut jauh lebih penting dalam konteks internasional. Ini adalah hari ketika negara adikuasa global dunia seperti British atau Inggris Raya melegitimasi pendudukan Thailand atas Negara Patani. Sedangkan Patani adalah satu-satunya negara Melayu utara yang tidak disebutkan dalam Perjanjian itu sendiri.

Patani benar-benar menghilang dari muka peta dan orang-orangnya menjadi orang Melayu yang terlupakan. Namun, peristiwa yang terjadi di Patani pada awal

³⁶ By S Nurfatimah · 2026 file:///C:/Users/HP/Downloads/4625-12258-2-PB%20(2).pdf

abad ke-20 bisa dibidang alasan mengapa British sangat ingin mendapatkan Siam untuk menyetujui meratifikasi Perjanjian 1909.

Kesungguhan perjanjian ini sebenarnya dijalankan sungguh-sungguh oleh Edward Henry Strobel Penasehat Urusan Luar Negeri Kerajaan Siam. Dia menemukan beberapa kesepakatan yang disegel bersama Inggris sebelum dia bertugas pada tahun 1906 di Siam merugikan Siam terutama urusan perdagangan bilateral dan keistimewaan lain seperti dalam Bowring (1855) dan Perjanjian Rahasia (1897).

Oleh itu, ia telah menyatakan kepada WD Beckett seorang pejabat kedutaan Inggris di Bangkok pada tahun 1907 akan hasratnya untuk menyeimbangkan posisi hubungan perdagangan dan mencabut hak keistimewaan Inggris di Siam dengan kesediaannya membujuk Raja Chulalongkorn menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara seperti Kedah, Terengganu dan Kelantan hanya ke Inggris sebagai imbalan. Tawaran itu mendapat reaksi positif dari Ralph Paget, Duta Inggris ke Siam serta Sir John Anderson, Komisaris Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Gubernur Negara-Negara Selat.

Melalui Perjanjian tersebut, pemerintah Siam menyerahkan negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu untuk bernaung di bawah pemerintahan Inggris. Perjanjian tersebut telah ditandatangani di Bangkok oleh Ralph Paget Duta Inggris di Siam Mewakili King Inggris dan Irlandia serta Pangeran Devawongse Varoprakar, Menteri Luar Kerajaan Siam ketika itu. Rincian Perjanjian Anglo-Siamse 1909 adalah seperti berikut:

Pertama Penyerahan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, dan pulau-pulau yang berdekatan ke Inggris. Kedua, Tanggal penyerahan dalam waktu tiga puluh setelah ratifikasi perjanjian, Ketiga Pengangkatan Komisi Campuran untuk perlintasan Inggris-Siam, Keempat Utang publik wilayah yang diserahkan akan tetap dibayar kepada Pemerintah Siam, Kelima Penghapusan yurisdiksi Konsul Inggris di Siam, Keenam Hak rakyat Inggris di Siam terhadap properti, perumahan dan perjalanan, pajak, dll. Ketujuh Konfirmasi perjanjian lama, Dan Kedelapan Ratifikasi dalam waktu empat bulan.

2.3.2 Dampak Perjanjian Melahir Spiral Peperangan Patani dan Thailand

Namun semua ini hanyalah sejarah dan sudah lama dilupakan. Banyak kelompok gerakan Melayu Patani yang sudah mulai aktif gerakan bersenjata, politik dan sosial, paling tidak, Perjanjian itu merupakan api yang semakin membara akan ketidakadilan yang terus mereka rasakan. “Perjanjian Anglo-Siamese tahun 1909 adalah sejarah. Namun, efeknya berlanjut dan tetap sampai hari ini. Baik Inggris Malaya dan Siam membuat keputusan mengabaikan penguasa Melayu Patani dan orang-orang di kedua sisi perbatasan. Itu dipaksakan oleh persuasi, intimidasi dan penggunaan kekuatan. Fakta bahwa orang-orang Melayu Patani di pedalaman Selatan masih memperjuangkan hak-hak mereka, keadilan dan kebebasan sampai hari ini hanya menegaskan bahwa Perjanjian 1909 memang merupakan “tragedi” dan mimpi buruk yang berkelanjutan bagi mereka, “Abu Hafez Al-Hakim, seorang senior anggota BIPP (Front Pembebasan Islam Patani) dan anggota tim Dialog MARA Patani.

“Sejarah adalah kunci untuk menyelesaikan konflik sehingga dengan Perjanjian Anglo-Siam pada tahun 1909 sangat relevan berkaitan dengan proses perdamaian dalam konflik Patani,” Kasturi Mahkota, Presiden PULO (Patani United Liberation Organization) dan anggota MARA Patani “Perjanjian Anglo-Siam adalah bukti bahwa Patani dijajah. Proses perdamaian tidak akan efektif karena Patani telah diduduki oleh Thailand dan tidak akan mengakui sebagai etnis Melayu, “Tuan Danial, Direktur LEMPAR (Akademi Patani Raya untuk Perdamaian dan Pembangunan) Perjanjian tersebut menimbulkan perubahan dalam sistem dan struktur sosial masyarakat. Muslim Patani yang sebelumnya menjadi mayoritas di wilayahnya, kini menjadi minoritas dalam kekuasaan Siam.

Rakyat Melayu Patani merasa menjadi warga negara kelas dua dan mengalami intimidasi oleh militer. Orang Thai menyebut mereka dengan “khaek” yang artinya pendatang dan juga disebut “Corn bang yeak dindan” yang bermakna derogatif sebagai separatist atau bandit, karena mereka tidak diakui oleh etnis Thai dan dianggap sebagai orang asing. Kendati demikian, rakyat Melayu Patani tidak mempunyai pilihan, mereka dipaksa menjadi sebahagian daripada kerajaan Thailand. Sejak itu terjadi pergolakan perlawanan dan konflik di tanah tersebut hingga sekarang yang tak usai berhenti.³⁷

2.3.3 Identitas Budaya

Masyarakat Thailand merupakan masyarakat yang mayoritas menganut agama Budha. Di Thailand hanya sedikit yang menganut agama Islam. Namun,

³⁷ Sumber: Patani Fakta dan Opini – Iza R. Hussin, *The Politics of Islamic Law: Local Elites, Colonial Authority, and the Making of the Muslim State*, University of Chicago Press. 08 September 2020

masyarakat di negara Thailand merupakan mayoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah negara China. Masyarakat muslim di Thailand mayoritas berada di wilayah selatan yaitu di Provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat ditambah dengan sebagian Satun dan Songkhla. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara Malaysia dimana penduduknya terdiri dari etnis Melayu sehingga biasa disebut dengan melayu-muslim.

Islam dan kebudayaan melayu menyatu dan tidak terpisahkan, oleh karena itu ada beberapa budaya yang melekat erat serta menjadikannya sebagai ciri khas pada melayu muslim Pattani bagian selatan Thailand. Budaya tersebut meliputi: Bahasa melayu (kecek nayu); bahasa kampong dan tengoh; tulisan Jawi (aksara jawi); hukum bersumber dari kitab fiqh; abangan dan santri; pendidikan: sekolah anubban, raudhoh, tadikayang; Pondok Pesantren; baju kurung.³⁸ Masyarakat Melayu Patani mempertahankan bahasa Melayu mereka, yang dikenal sebagai bahasa Melayu Patani atau bahasa Jawi, serta tradisi budaya dan agama Islam yang kuat.³⁹

2.3.4 Bahasa

Bahasa Melayu Patani adalah dialek Melayu yang berbeda dari bahasa Melayu standar, dan memiliki beberapa variasi lokal seperti dialek Yala dan Menara. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa pengantar di wilayah tersebut dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

³⁸ Jurnal Novia Isti Setiarini, M. Misbah, Kholid Maward Budaya Muslim Melayu Pattani Thailand Selatan

³⁹ Patani Malay Minority, Rights and Identity, Thailand

⁴⁰ Patani Malay Minority, Rights and Identity, Thailand

2.3.5 Agama

Mayoritas penduduk Melayu Patani adalah Muslim, dan agama Islam memainkan peran penting dalam kehidupan mereka.⁴¹

2.3.6 Hubungan dengan Thailand

Setelah wilayah Patani dianeksasi oleh Thailand, masyarakat Melayu Patani menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan identitas mereka dan hak-hak mereka. Ada ketegangan antara masyarakat Melayu Patani dan pemerintah Thailand, terutama terkait dengan isu-isu politik, budaya, dan agama.⁴²

2.3.7 Upaya Pelestarian:

Diplomasi perdamaian Nahdlatul Ulama melalui kunjungan delegasi pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke Thailand adalah atas restu resmi pemerintah Thailand. Kunjungan delegasi Nahdlatul Ulama ke Thailand berlangsung pada tahun 2005 dengan dipimpin langsung oleh Ketua PBNU K.H. A Hasyim Muzadi. Kunjungan ini untuk membantu memediasi konflik Patani di Thailand Selatan. Kunjungan delegasi Nahdlatul Ulama ke Thailand dalam rangka misi diplomasi perdamaian berlangsung sebanyak dua kali. Kunjungan pertama pada 27 Maret-1 April 2005 dan kunjungan ke- dua pada 11-12 September 2006. Kunjungan delegasi Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada 27 Maret-1 April 2005 merupakan kunjungan resmi dalam rangka memediasi konflik berkepanjangan di wilayah Patani, Thailand Selatan. Karena kunjungan bersifat

⁴¹ Patani Malay Minority, Rights and Identity, Thailand

⁴² Patani Malay Minority, Rights and Identity, Thailand

misi mediasi, maka kegiatan kunjungan diisi serangkaian pertemuan dengan kalangan elite pemimpin nasional Thailand dan representasi Melayu muslim Patani.⁴³

Masyarakat Melayu Patani dan organisasi masyarakat sipil terus berupaya untuk melestarikan bahasa, budaya, dan warisan sejarah mereka. Secara keseluruhan, Melayu Patani adalah kelompok etnis yang memiliki sejarah, bahasa, dan budaya yang unik, serta terus berjuang untuk mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan politik dan sosial di Thailand Selatan, menurut PDM Kota Metro⁴⁴

2.4 Profil Tuang Guru Haji Sulong

2.4.1 Biografi Singkat

Muhammad bin Abdul Kadir bin Zainal Abidin bin Ahmad (Haji Sulong) (1895- 1954) termasuk seorang cendekiawan Islam, pemimpin pergerakan Islam dan nasionalisme Melayu bidang pendidikan, agama dan sosio-politik. Ia termasuk juga dalam kelompok ulama yang memimpin reformasi agama dan gerakan nasionalis di Malaya dan Indonesia pada dekade pertama abad ke-20. Di bidang agama, ada dua kegiatan penting yang pernah dilakukan oleh Haji Sulong, yaitu kegiatan mengajar secara berdakwah dan upayanya dalam membela hukum Syariah. Haji Sulong mengajar agama dengan berdakwah di seluruh Pattani. Abdulfatta Jeh-Ngoh Setelah melihat dukungan yang mulai tumbuh di masyarakat, barulah Haji Sulong mulai mengenalkan gagasan lembaga pendidikan

⁴³ Jurnal Tom Finaldin, Muhammad Rifki Ihwannudin Diplomasi Nahdlatul Ulama dalam Menangani Konflik Antara Pemerintah Thailand dengan Muslim Patani

⁴⁴ Patani Malay Minority, Rights and Identity, Thailand

dalam bentuk modern kepada masyarakat, yaitu Madrasah al-Maarif al-Wataniah dapat berdiri. Perjuangan Haji Sulong dalam bidang politik dengan terlibat dalam perjuangan memperbaiki nasib umat Islam Patani. Sebuah perjuangan yang menyempurnakan karir hidupnya meskipun upaya ini tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand, tetapi memberikan kontribusi besar bagi perjuangan umat Islam Patani di masa depan.⁴⁵

2.4.2 Penubuhan Organisasi

Pada tahun yang sama, Haji Sulong turut menubuhkan organisasi Islam di Patani, atau Pergerakan Melayu Pattani (*Patani Malay Movement-PMM*) dengan matlamat menggalakkan kerjasama antara pemimpin Melayu bagi menentang campur tangan kerajaan dalam cara hidup Islam. Pada 1948, kerajaan Khuang membenarkan penangkapan Haji Sulong. Pada 16 Januari 1948 Haji Sulong dan rakan-rakannya ditangkap dan dituduh derhaka. Sebagaimana dijangka, penahanan tersebut mencetus bantahan dan rasa tidak puas hati di kawasan tersebut. Peguam jajahan Pattani kemudiannya meminta perbicaraan dipindahkan ke daerah Nakhon Si Thammarat. Selepas perbicaraan, dia dijatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun yang kemudiannya dikurangkan kepada empat tahun dan lapan bulan sebelum dia dibebaskan pada 1952. Haji Sulong kemudian kembali ke Pattani, yang ketika itu sedang bergolak.

Pada tahun 1954 dia hilang dengan tiba-tiba selepas melapor diri ke pejabat Polis Cawangan Khas di daerah Songkhla. Ini menimbulkan kepercayaan ramai bahawa dia dan anak sulungnya, Wan Muhammad, telah dibunuh oleh polis Thai

⁴⁵ By S Nurfatimah · 2026 file:///C:/Users/HP/Downloads/4625-12258-2-PB%20(2).pdf

dengan arahan Jeneral Phao Siyanond, ketika itu Director-General Jabatan Polis, pada malam 13 Ogos 1954. Mereka dikatakan diikat kepada batu dan dicampak ke laut berhampiran pulau Nu.⁴⁶

2.4.3 Proses Resolusi Konflik 7 Tuntutan

Proses resolusi konflik 7 tuntutan, yaitu:

- a. Mengadakan seorang ketua yang beragama Islam diperanankan di dalam 3 Wilayah (Selatan Thailand) ini dengan pilihan dari rayat di dalam 3 Wilayah (Selatan Thailand) dengam diberikan kusa penuh kepadanya iaitu mentadbir 3 wilayah Selatan Thailand.
- b. Mengadakan pelajar Bahasa Melayu pada setia-setiap sekolah bagi anak-anak berumur 7 tahun sebelum masuk belajar Bahasa Thailand atau bercampur Pelajaran dengan Bahasa Thailand.
- c. Kehasilan atau kedapatan dalam 3 wilayah Selatan Thailand dibelanjakan 80%.
- d. Pegawai Kerajaan dipakai orang Islam Melayu Patani 80% mengikut penduduk negeri banyak yang beragama Islam.
- e. Bahasa Melayu menjadi Bahasa resmi.
- f. Mengasingkan mahkamah Syariat dari pada pejabat undang-undang Kerajaan serta mengadakan mahkamah Khas iaitu untuk menguruskan dakwaan yang bersabit dengan hukum Agama Islam.

⁴⁶ Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand Diarkibkan 2012-06-07 di Wayback Machine

- g. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan persetujuan oleh ketua besar di 3 Wilayah Selatan Thailand.

Seorang *Tuan Guru Haji Sulong* memberi alasan dan menjelaskan kepada rayat mengapa tuntutan dibuat:

1. Rayar Patani (Selatan Thailand) dalam keadaan tertindas oleh pemerintahan siam (Thailand) Dimana siapa yang tidak bersetuju atau membantah ditangkap kemudian bawa kesuatu tempat bila sampai separuh jalan lalu ditembak bunuh. Peristiwa ini telah terjadi berpuluh-puluhan nyawa rayat yang tidak bersalah. Penduduk tidak berani membuat laporan kepada pihak yang lebih berkuasa kerana takut akan diseksa lebih kejam.
2. Berlakunya penipuan dan pemerasan uang rayat oleh pegawai atasan serta membunuh siapa yang melawan.⁴⁷

2.5 Faktor-faktor Perkembangan Nasionalisme di Patani

Awal-awal factor perkembangan nasionalisme berunsur sosio-agama yang berkait rapat dengan konsep Islam sebenar bermula pada awal abad 20 ini. Pada peringkat ini Masyarakat Islam Patani (Selatan Thailand) banyak dipengaruhi oleh Gerakan Pan-Islamisme di negara-negara timur tengah anjuran gerakan Islam pembaharuan Islam (GIPI) dibawah pimpinan Imam *Muhammad Abduh 1849-1905* di kota Mekkah. Ramai tokoh-tokoh Islam termuka di Patani (Selatan Thailand) seperti *Tuan Guru Syekh Wan Ahmad Muhammad Zain Al-Fathoni*

⁴⁷ Diskusi pemikiran Tuan Guru Haji Sulong, Kiluan Permata Pattani telah didiskusikan di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur (DBPWT), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia tanggal 9 Januari 2016 lalu

1856-1918, Syekh Abdul Rahman Muhammad Ali Al-Fathoni, Tuan Haji Shamsudin Musthafa dan ramai lagi telah menyuburkan lagi pergerakan Islam ini. Dari tanah Melayu atau Melaya pengaruh dan idea Kesultanan Melayu Muda ringkasan (KMM) yang ditumbuhkan pada tahun 1937 oleh Ibrahim Ya'kub dan Ishaq Haji Muhammad telah menular kewilayah-wilayah Patani (Selatan Thailand). Ibrahim Ya'kub pernah berbica secara sulit menyusup masuk ke Patani pada tahun 1940 dan ramai pemuda Melayu Patani menganggotai KMM. Prinsip pertumbuhan tersebut ialah menyatukan seluruh Umat Islam Berbangsa Melayu di Semenanjung dan Nusantara khususnya telah membangkitkan kesadaran kebangsaan Melayu Patani yang dirundung penjajah siam (Thailand).⁴⁸

Dalam pada itu tekanan dasar pemerintahan Thailand diktator Phibum Songkram sebagai perdana Menteri telah memberi Kesan yang mendalam di hati orang-orang Melayu negara itu. Meraka merasakan kebudayaan yang menjadi teras identitas Melayu telah dicabuli menerusi usaha-usaha penindasan Agama Islam yang dicintai semakin tercermar, maruah bangsa telah dinodai. Orang-orang Melayu memang sensitif mengenai sesuatu yang menyetuh tentang Islam dan Bangsa Melayu. Dalam masa yang sama timbul perasaan benci terhadap keganasan tentera dan polisi Thailand yang tidak berdisplin terutama selepas perang dunia ke dua. Di sepanjang itu perbuatan rasuah semakin menjadi ramai orang-orang Melayu Patani ditembak mati secara membabi buta dan Ulama-ulama dipotong leher dan Masyarakat awam dihukum tanpa dihadapkan ke muka pengadilan terlebih dahulu. Menyadari penidasan dan tekanan ini daerah Teluban

⁴⁸ Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol 2. No.2 Juli 2020

(Wilayah Pattani) ditumbuhkan Persatuan Fajariah Setiausaha (PFS) *Tengku Abdul Jalal ibnu Alm. Tengku Abdul Muthakib* raja daerah taluban (Wilayah Pattani) terakhir juga merupakan wakilan parlimen Wilayah Narathiwat dan penasihatnya *Tuan Haji Yusoh*. Ini diijuti dengan penuduhan semangat Patani yang di pertuannya ialah *Wan Usman Wan Ahmad* dan turut di anggotai *Tuan Guru Haji Sulong bin Abdul Qadir* seorang Ulama terkenal di Patani.⁴⁹



⁴⁹ Sejarah Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) Thailand selatan pada tahun 2008-2017

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Jenis penelitian deskriptif biografi historis dan studi dokumen kepustakaan. Pendekatan ini dipilih kerana sesuai untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam dinamika umat Islam melayu Patani dan resolusi konflik Studi kasus: Peran Tuan Haji Sulong dan masyarakat Melayu Patani.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sangat tepat untuk menjawab masalah penelitian yang kompleks. Penelitian ini dipandang memiliki kelebihan karena bukan hanya mengejar hasil dari suatu penelitian, melainkan lebih menekankan pada proses penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penekanan pada proses dan pencarian makna lebih ditonjolkan sehingga mendorong kemungkinan penemuan teori baru, data lebih lengkap dan komprehensif.⁵⁰

Jenis penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data ini biasanya menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu studi kasus, studi dokumen, objek, fenomena, atau subjek yang sedang diteliti. Data

⁵⁰ Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2024

kualitatif sering diperoleh melalui metode seperti jurnal ilmiah, artikel opini, media internet, berita-berita, surat kabar, dan buku-buku referensi.⁵¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kajian perpustakaan (*library research*) dan dilakukan secara data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti kajian Pustaka, studi literatur, situs-situs internet, terbitan institusi, jurnal, artikel dari buku-buku.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan yaitu data sekunder, berupa jurnal ilmiah, artikel opini, media internet, berita surat kabar, dan buku-buku referensi. Kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber yang akurat. Kamu bisa menggunakan buku referensi, jurnal, penelitian sebelumnya, hingga internet.

1. Jurnal Penelitian

Dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru.

2. Buku

Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya.

⁵¹ Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh 26-03-2026

3. Surat Kabar Dan Majalah

Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kamu dapat mencantumkan referensi kajian Pustaka dari berbagai berita dan artikel yang ada di surat kabar maupun majalah.

4. Internet

Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi, para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat.⁵²

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan studi pustaka, yaitu penulisan literatur dari media internet, jurnal ilmiah, buku-buku dan document sejarah. (patani sejarah dan politik di alam melayu, sejarah dan politik patani) dll. Dalam penelitian kajian pustaka, teknik pengumpulan data adalah metode atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang berguna untuk tujuan penelitian; melalui studi dokumentasi, angket (kuesioner), atau studi pustaka.

Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, landasan teori bisa diambil dari berbagai macam media, seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, koran, dan lain-lain. Namun, dalam memilih teori yang akan digunakan.⁵³

⁵² Apa itu Kajian Pustaka: Jenis dan Contoh [Lengkap] 12 Februari 2025 oleh Luqman Hakim

⁵³ <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/>

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang dilakukan secara sistematis, dengan tahapan:

- a. Reduksi Data (menyaring data yang relevan).
- b. Kategorisasi tema (misalnya: kebebasan sipil, implikasi atau dampak).
- c. Penarikan Kesimpulan dan interpretasi terhadap usaha perjuangan Tuan Guru Haji Sulong.

Kegiatan evaluasi meliputi mencari, membaca, dan memilah kajian-kajian penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis pustaka dilakukan dengan merangkum, membandingkan hasil penelitian pada jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁴

⁵⁴ Journal (PNJ),1(2),74.<https://doi.org/10.30602/pnj.v1i2.292>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Runtuhnya Kesultanan Melayu Patani

Di akhir tahun 1680an (abad 17 M.) diakhir pemerintahan Raja Kuning kesultanan Patani mulai terlihat kemundurannya. Pemerintahan Raja Kuning berlangsung antara tahun 1635-1686. Pada masa pemerintahannya Raja Kuning lebih mengutamakan usaha dalam bidang perdagangan dengan dibentuknya Sarekat Perdagangan Diraja Patani, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan Kesultanan Joho, hubungan yang baik ini melahirkan kondisi perekonomian yang baik di kedua kesultanan. semenjak Raja Kuning pemerintahannya mulai berakhir kemerosotan itu muncul. selain masalah politik juga akibat adanya perselingkuhan dengan Penari istana. Selain itu, terjadi perselisihan dengan kerajaan Siam dan juga usia Raja Kuning sudah tua.

Wafatnya sang Sultan/Raja mulai menandai berakhirnya pemerintahan kesultanan Patani. Karena tidak ada keturunan yang cocok untuk memimpin kesultanan Patani. Walaupun kesultanan ini mulai merosot keberadaannya akan tetapi eksistensinya tetap ada. Dimana para pembesar kesultanan kemudian melakukan musyawarah dan kesepakatan untuk memutuskan bahwa keturunan dari raja-raja Kelantan yang tinggal di Kampung Raja dapat menggantikan raja Kuning. Kemudian selanjutnya kepemimpinan dari Dinasti Kelantan dimulai dan yang pertama dipimpin oleh raja Bakar dan berikutnya oleh Raja Mas Kelantan dan selanjutnya estapet kepemimpinan dipegang oleh Raja Mas Jayam. Karena Raja terakhir ini tidak meninggalkan putra mahkota atau pewaris tahta maka

dilakukan lagi kesepakatan dan musyawarah oleh para pembesar kesultanan, musyawarah dan kesepakatan para pembesar dilaksanakan dan akhirnya memilih Sultan Muhamad untuk menjadi penguasa di Kesultanan Patani.

Saat kesultanan masih dipimpin oleh Raja Bakar, Mas Kelantan dan Mas Jayam kondisi kesultanan Patani sangat baik, aman dan tenang dan tidak pernah diserang oleh musuh-musuhnya terutama orang-orang Siam Tha. Sebaliknya terjadi seranganketika Patani di pimpin oleh para Seri Wangsa Pelabuhan di Patani diisi oleh para saudagar dari Eropa dan hanya di isi oleh Saudagar dari China, Arab Jepang serta India Muslim. Perselisihan dengan kerajaan Siam belum pernah terjadi karena kerajaan Siam pada waktu itu lebih banyak menyelesaikan masalah dengan Burma, karena Burma sering melakukan penyerangan kepada kerajaan Siam sehingga mereka lebih focus ke sana. Setelah keadaan membaik Raja Muda Siam berniat mengirim utusan kepada Patani, namun Sultan Muhammad menolak keinginan Raja Siam tersebut.⁵⁵

Hal ini memancing peperangan kontak langsung antara Siam dengan Patani, namun persiapan Sultan Muhammad yang kurang baik dari segi peralatan tempur dan sumber daya manusia menyebabkan kalahnya Kesultanan Patani atas kerajaan Siam (Thailand) dan setelah itu undang-undang Kesultanan berganti dengan perundang-undangan Siam (Thailand). Kemudian menentukan seorang Sultan yang bernama Tengku Lamidin. Hal ini menandai hak penuh Siam (Thailand) atas Patani. Meski demikian, Sultan Lamidin yang diangkat oleh Siam itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi atas tanah kelahirannya, maka pada

⁵⁵ JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol 2. No.2 Juli 2020.

tahun 1789 M Sultan Lamidin mengutus utusannya kepada raja Annam (Vietnam) untuk bekerjasama melawan Siam, namun surat yang dikirim oleh utusannya malah di berikan kepada Raja Siam yang mengakibatkan marahnya Raja Siam dan pada akhirnya pada tahun 1791 M. Patani mendapat serangan kembali oleh Kerajaan Siam dan akhirnya mengalami kekalahan.

Akhirnya, Siam (Thailand) memilih pembesar Melayu Patani kembali yaitu Datuk Pangkalan sebagai pemimpin di Patani. Datuk Pangkalan pun membelot dari aturan yang telah ditetapkan Siam dan pada akhirnya Patani mengalami kekalahan kembali. Kemudian kerajaan Siam (Thailand) memilih seorang dari Negara nya sendiri untuk memimpin Patani yang bernama Nai Khuan Sai. Selanjutnya dalam perkembangan usaha untuk memecah belah persatuan kesultanan Patani, maka Patani di bagi menjadi tujuh wilayah yang masing masing memiliki pemimpin sendiri; pertama Nik Dih diangkat menjadi Raja Teluban ditempatkan di kota Taluban, kedua Nai Pai diangkat menjadi Raja Sai dan ditempatkan di Kota Jerenga; ketiga Nik Dah diangkat menjadi Raja Legeh dan ditempatkan di Kota Legeh, empat Tuan Jalur diangkat menjadi Raja Jalur dan ditempatkan di Kota Jala, lima Tuan Mansur diangkat menjadi Raja Reman dan ditempatkan di Kota Baharu, enam Tuan Nik diangkat menjadi Raja Nongcik dan ditempatkan di Kota Nongchik, tujuh Tuan Sulong diangkat menjadi Raja Patani dan di tempatkan di Kota Griseik.⁵⁶

Telah penulis paparkan sebelumnya eksistensi kesultanan Patani mulai mengalami kemerosotan keberadaanya karena tidak adanya penerus yang cocok

⁵⁶ P. Rudolf Yuniarto, *Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi*, (Nasional Thailand, LIPI, Internet Format PDF)

dan Sultan atau Raja dan mumpuni untuk mempertahankan kondisi kesultanan. Keadaan semakin sulit ketika kesultanan ini di serang oleh kerajaan Siam kemudian menjadi bagian wilayah kekuasaan kerajaan tersebut dan perkembangan selanjutnya situasi Patani semakin terpojok akibat adanya perjanjian antara pihak kerajaan Inggris dengan kerajaan Siam (Thailand) dalam hal pembagian wilayah. Situasi politik regional akibat adanya kolonialisasi Eropah di wilayah Asia mendorong Siam (Thailand) untuk merekonstruksi wilayah kekuasaan mereka untuk membendung arus imperialis yang ingin menguasai wilayah Semenanjung. Terlebih lagi wilayah seperti Kelantan, Kedah, Terengganu, dan Patani yang di nilai amat baik untuk wilayah pelabuhan ekonomi dan pangkalan perang armada Inggris.⁵⁷

4.2 Peran dan Perjuangan haji sulong dalam resolusi konflik di Patani

Secara umum diketahui bahwa Islam adalah agama yang mencakup hal hal keagamaan pada khususnya dan hal-hal lain pada umumnya, namun penulis membagi aspek agama ini secara terpisah dari aspek Pendidikan dan Politik sehingga uraiannya dapat diungkapkan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Demikian pula, dalam memberikan gambaran tentang karir Tuan Guru Haji Sulong, ia yang menjadi populer di kalangan para pelajar dan Jemaah haji dari Asia Tenggara di Mekkah, dan melalui mereka prestise dan pengaruhnya bertambah besar.⁵⁹ Menurut Roff (1967), dan Noer (1975) dalam Pitsuwan, Haji

⁵⁷ JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol 2. No.2 Juli 2020.

Sulong termasuk dalam kelompok ulama yang memimpin reformasi agama dan gerakan nasionalis di Malaya dan Indonesia pada dekade pertama abad ke-20⁵⁸

4.2.1 Bidang Agama

Di bidang keagamaan, dua kegiatan penting yang pernah dilakukan oleh Haji Sulong. Pertama, kegiatan mengajar secara bertabligh dan kedua, upayanya dalam membela hukum Syariah.:

Pertama : Berikan pengajaran secara bertabligh.

Selama dua puluh tahun berada di Mekkah, masyarakat Patani masih dalam kondisi jahil, suka berjudi, merokok candu dan berkelahi ayam, tidak ada perubahan suasana yang lebih baik seperti dulu. Saat kembali ke Patani (1927), Haji Sulong tidak percaya bahwa masyarakat Patani masih dalam keadaan stagnasi yang parah. Islam semakin tercemar, identitas Melayu Islam yang dicintai semakin dicabuli dan menerusi usaha-usaha penindasan. Karena itu, Haji Sulong mulai bertabligh dan berdakwah selama dua tahun. Dakwahnya dengan cara mengajar ke seluruh tempat di Patani. Dakwahnya dengan cara mengajar ke seluruh tempat di Patani. Pengajaran dan pemberian yang sangat menarik, progresif dan bersemangat membawa ramai penduduk selalu ikut hadir ke-ceramahnya yang biasanya diadakan di masjid-masjid dan tempat yang beliau datang mengajar.⁵⁹

Ketenarannya sebagai seorang ulama yang berani berbicara dan memberikan ceramah dan pelajaran yang sangat menarik, menjadi perbincangan banyak warga desa. Masyarakat sangat memberi penghormatan kepadanya

⁵⁸ Surin Pit Suwan, Islam di Muang Thai..., hlm. 115

⁵⁹ Surin Pit Suwan, Islam di Muang Thai..., hlm. 114

sehingga ketika tiba di Tiba dengan kereta api, dia disambut dengan hangat oleh banyak penduduk setempat dan kemudian membawa payung menuju tempat yang disediakan oleh mereka.⁶⁰

Kedua: Usaha Haji Sulong dalam menegakkan hukum Syariah.

Tekanan diktato pemerintahan Phibul Songkhram telah berdampak besar di hati para-Muslim Melayu itu. Minoritas Muslim Patani di bawah Phibul Songkhram melancarkan kebijakan budaya "siamisasi" semua orang untuk mencapai pemahaman nasional bahwa "orang Thai" memiliki bahasa yang sama, agama yang sama, dan budaya yang sama.⁶¹

Untuk menghadapi kebijakan Ratthaniyom (Siamiasasi) yang diciptakan oleh Phiboon Songkram . Haji Sulong diangkat oleh komunitas Muslim Sebagai Kadi Syariah Provinsi Pattani (27 Oktober 1943)⁶⁴, tindakan Haji Sulong menyadarkan pemerintah Thailand untuk menghidupkan kembali hukum Islam yang dicabut pada masa pemerintahan Phiboon Songkram . Kemudian pada tahun 1944 Haji Sulong dan para ulama Patani lain mendirikan pertubuhan “Majlis Hay’ah al-Munfizah al-Ahkami al-Shar’iyyah” dan kemudian ditukar pula kepada “Hay’ah al-Munfizah al-Ahkami al-Shar’iyyah”, cikal bakal Majlis Agama Islam.⁶⁵ Pemerintahan yang dipimpin oleh Pridi Phanomyong kemudian memberlakukan undang-undang Mengayomi Islam tahun 1945 (petronase act) pada 3 Meii 1945. Dari pada akta tersebut dinyatakan ketentuan kompilasi hukum Islam dan mewujudkan kembali Chularajmontri (Syiekh al-Islam) atau Pusat Islam Thailand. Selain itu mewujudkannya Majelis Agama Islam daerah (1946),

⁶⁰ Jawi Peranakan, 7 Januari 1887, Vol 11. No. 515

⁶¹ Numan Hayimasae, “Haji Sulong...”,hlm.119

untuk distrik berpenduduk Muslim serta pengangkatan anggotanya. Dan yang paling penting mengadakan kembali kadi Wilayah.⁶²

Haji Sulong dulu adalah salah satu ulama yang mencurigai adanya keterlibatan pemerintah dalam urusan agama komunitas. Dia berpendapat bahwa campur tangan politik dalam masalah hukum sejak zaman Raja Chulalongkorn telah merusak kemurnian Islam. Dia menolak ikut dalam upaya mengkodifikasikan dan menerjemahkan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa bidang itu harus tetap berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi orang Muslim sendiri.⁶⁷ Kesediannya menjadi ketua Majlis Agama Islam Provinsi dalam 1945 sejalan dengan keyakinannya bahwa kerja sama politik dilakukan tanpa intervensi budaya. Majelis dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat tanpa mengorbankan kehidupan beragama masyarakat yang harus tetap bebas dan murni secara mutlak.⁶³

4.2.2 Bidang Pendidikan

Sewaktu di Mekkah Haji Sulong menjadi popular di kalangan para pelajar dan Jemaah haji dari Asia Tenggara di Mekkah, dan melalui mereka prestise dan pengaruhnya bertambah besar. Ia kembali ke Patani pada tahun 1927 dan melalui karir sebagai pengajar yang menarik murid-murid dari seluruh pelosok Dunia Melayu.⁶⁴

Pada tahun-tahun awal kepulangannya, Haji Sulong mulai mengajar agama dengan berdakwah di seluruh Pattani (Pattani, Yala, Narathiwat, dan

⁶² Surin Pit Suwan, Islam di Muang Thai..., hlm.68-71

⁶³ Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani, hlm. 53

⁶⁴ Surin Pit Suwan, Islam di Muang Thai..., hlm.115-116

Songkhla). Setelah melihat dukungan yang mulai tumbuh di masyarakat, barulah Haji Sulong mulai mengenalkan gagasan lembaga pendidikan dalam bentuk modern kepada masyarakat. Sampai. Sehingga pendirian Madrasah al-Maarif al-Wataniah dapat berdiri, proses pembangunan yang dimulai pada tahun 1929 dan selesai pada tahun 1933. Madrasah al-Maarif al-Wataniah merupakan sekolah Islam model baru yang tidak hanya memiliki jenjang mata pelajaran, metode pembelajaran dan sistem kelas, tetapi juga menjadi istimewa dengan menjalani latihan berbaris di awal pagi sebelum masuk kelas, madrasah binaan Haji Sulong ini merupakan madrasah pertama di Patani dan cikal bakal madrasah masa depan di Patani⁷⁰ Sistem pembelajaran menjadi lebih teratur dan sistematis, melalui aktifitas pendidikan, ia melancarkan serangkaian pembaruan pendidikannya sebagai upaya memberikan landasan dasar bagi modernisasi sistem kelembagaan pendidikan Islam Patani, yang pengaruhnya sangat kuat mewarnai corak perkembangan dan sistem kelembagaan pendidikan Islam, khususnya pondok, di tanah air bahkan hingga kini.⁶⁵

Meskipun mendapat sambutan baik daripada masyarakat, tetapi sekolah madrasah ini ditakdirkan tidak berusia lama. Pada akhir tahun 1935 madrasah ini menerima perintah penutupan dari pihak berkuasa pemerintah Thai yang sangat merasa curiga atas sambutan dan perkembangannya.⁶⁶

⁶⁵ Surin Pit Suwan, *Islam di Muang Thai...*, hlm.116

⁶⁶ Chalerm-kiat Khunthongphet, "Karn Tortarn...", hlm.22; Ahmad Fathy, "Tuan Guru Haji Sulong ...", hlm.344

4.2.3 Bidang Politik

Perjuangan Haji Sulong yang terlibat dalam perjuangan memperbaiki nasib umat Islam Patani. Sebuah perjuangan yang menyempurnakan karir hidupnya meskipun upaya ini tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand. tetapi memberikan kontribusi besar bagi perjuangan umat Islam Patani di masa depan. Upaya ini merupakan hasil pertemuan antara tokoh Islam setempat pada tanggal 1 April 1947. Mereka di bawah pimpinan Haji Sulong sepakat untuk menyerahkan proposal memorandum yang berisi beberapa tuntutan masyarakat Muslim Patani kepada perwakilan pemerintah Thailand dalam pertemuan nanti, 3 April 1947. Pada tanggal 3 April 1947, golongan melayu Patani dibawah pimpinan Haji Sulong menghasilkan memorandum proposal tujuh poin otonomi kepada pemerintah Thai. Tuntutan tersebut meliputi otonomi hukum bagi pengadilan Islam, pembentukan dewan keagamaan, penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa resmi kedua di Patani, dan control terhadap pemerintahan dan keuangan daerah selatan Thailand. Tuntutan inilah sebagai esensi dari perjuangan Haji Sulong yang mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upaya untuk mempertahankan identitas dan kemurnian bangsa Melayu yang Islam.⁶⁷

Tuntutan itu mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upaya untuk mempertahankan identitas dan kemurnian bangsa Melayu yang Islam. Namun, Pemerintah Thai tidak bersedia merundingkan soal pembentukan daerah otonom. Pemenuhan tuntutan golongan Melayu-Muslim dikhawatirkan akan mencetuskan tuntutan-tuntutan serupa dari berbagai minoritas etnik

⁶⁷ Ahmad Fathy, "Tuan Guru Haji Sulong...", hlm.444

dibagian-bagian lainnya di negeri Thai. Bagi pemerintah Thai, Patani akan tetap dianggap sebagai suatu bagian integral dari Negara kesatuan dengan birokrasi yang dikontrol dari pusat dan dengan sistem hukum tunggal, kecuali bidang hokum perorangan dan kebiasaan-kebiasaan di bidang hokum warisan yang sudah disahkan sebelumnya. Keengganan pihak pemerintah untuk berunding, menyebabkan Haji Sulong dan para pendukungnya melakukan tekanan yang lebih besar dengan jalan mengancamkan akan memboikot pemilihan umum yang direncanakan pada akhir januari 1948. Haji Sulong dan rekan-rekannya ditangkap pada tanggal 16 januari 1948 dengan tuduhan sedang mempersiapkan dan berkomplot untuk merubah pemerintahan kerajaan yang tradisional, serata mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.⁶⁸

Penangkapan Haji Sulong menyebabkan pemerintahan Thai mendapat tekanan internasional yaitu dari Liga Arab dan PBB. Selain itu terbentuk koalisi internasional yang terbentuk mendukung perjuangan Melayu-Muslim yaitu Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR) yang terbentuk bulan Maret 1948. Persoalan Haji Sulong baru dapat diselesaikan pada tahun 1952 setelah empat tahun dia meringkuk di penjara. Selepas di penjara Haji Sulong kembali ke Patani dan menjadi pengajar (da'i). setiap beliau memberikan ceramah selalu dipadati oleh masyarakat dari berbagai daerahdi Patani. Namun, keadaan tenang dan aman hanya berlalu selama dua tahun. Pada hari jumat, 13 Agustus 1954, beliau dipanggil oleh ketua penyiasat polisi Thai, Letkor Bundert Lethpricha bersama rekan-rekan, dan anaknya Ahmad bin Haji Sulong hadir ke Songgora (Sekarang

⁶⁸ Ahmad Fathy al-Fatani, "Tuan Guru Haji Sulong...",hlm.16

Provinsi Songkhla). Tidak diketahui apa yang terjadi setelah pertemuan tertutup itu, tetapi yang jelas sejak pertemuan itu Haji Sulong, dan rekan-rekannya hilang dan tidak kembali ke rumah mereka di Patani sampai sekarang. Dikhabarkan kemudian bahwa mereka semua dibunuh dan dibuang ke laut Senggora berdekatan dengan pulau Tikus (Semila Beach) pada malam Sabtu, 13 Agustus 1954.⁶⁹

4.3 Implikasi atau Dampak Langkah Proses Perjuangan Damai di Patani terhadap Proses Resolusi Konflik Kerajaan Thailand

Menurut pendekatan instrumentalisme, konflik etnik terjadi karena adanya wirausahawan politik yang menggunakan identitas etnik sebagai basis mobilisasi atau fault-line untuk mencapai kepentingannya. Secara eksplisit Varshney menyebutkan bahwa *“conflicts take place because leaders strategically manipulate ethnicity for the sake of political power, or for extracting resources from the state (Varshney 2009, p.282).⁷⁰*

Identitas etnis sebagai segala identitas yang bersifat sticky dan visible atau atribut turun-menurun ‘descent-based attributes’ Sticky artinya identitas yang berasal dari nenek moyang dan akan sulit diubah dalam jangka waktu yang pendek, dan sebaliknya, identitas yang tidak bersifat turunan akan dengan mudah diubah. Sedangkan visible artinya atribut identitas tersebut dapat dengan mudah dikenali baik dari nama, bentuk tubuh, maupun pakaian edangkan visible artinya atribut identitas tersebut dapat dengan mudah dikenali baik dari nama, bentuk tubuh, maupun pakaian menjelaskan alasan pemilihan identitas etnik sebagai basis

⁶⁹ Ahmad Fathy, “Tuan Guru Haji Sulong...”, hlm. 355-35

⁷⁰ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

mobilisasi karena identitas yang tetap atau turun temurun, mampu membentuk dan mengunci “minimum winning coalition” dalam kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Dalam kasus ini, identitas etnik Melayu dan Muslim merupakan identitas yang sticky dan visible karena merupakan identitas turun-temurun sejak Kerajaan Patani berdiri.⁷¹

Terdapat tiga alasan mengapa konflik kekerasan di Thailand Selatan ini adalah konflik kepentingan elit lokal. Ketiga penjelasan tersebut juga secara tidak langsung menumbangkan argumen primordialis mengenai “ancient hatred” dengan ganti otonomi lokal. **Pertama**, kebencian dan pemberontakan ini diluncurkan oleh elit-elit lokal. Pada proses inkorporasi Kerajaan Patani ke dalam Kerajaan Siam, Kerajaan Siam mengganti elit tradisional dengan pejabat sipil yang berasal dari Kerajaan Siam yang dianggap loyal. Terlebih lagi, Kerajaan Patani yang pada awalnya satu, kemudian dibagi menjadi tiga provinsi yang semakin melemahkan otoritas tradisional.⁷²

Kedua, pemimpin pemberontak berasal dari kelompok elit lokal yaitu aktor yang saling menopang mengingat Islam merupakan identitas dari Kerajaan Patani. Dengan adanya kebijakan asimilasi, maka tak hanya kekuatan Sultan Patani diperkecil, namun masyarakat Muslim Patani juga terdampak akibat hilangnya kebebasan beragama Islam, berbahasa melayu, dan mempunyai sistem pendidikan dengan sharia Islam. Ketika Pemerintah Thailand mulai menerapkan kebijakan asimilasi dan sentralisasi, elit dari Patani yaitu Tengku Mahmud Mahyiddeen memimpin GAMPAR (Gabungan Melayu Pattani Raya) tahun 1940

⁷¹ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

⁷² Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

melawan Pemerintah Thailand; Tengku Abdul Jalal, melobi pemerintah Inggris untuk bergabung dengan Malaysia; Tengku Bira Kotanila mendirikan PULO; Haji Abdul Karim Hassan pendiri Barisan Revolusi Nasional; dan New Pulo didirikan oleh Arong Mooreng dan Haji Abdul Rohman Bazo.⁷³

Ketiga, pemberian otonomi kepada elit mampu menekan secara signifikan konflik kekerasan pada tahun 1980-1999 pada masa Perdana Menteri Prem Tinsulanonda. Dua program yang berhasil menurunkan angka kekerasan etnik adalah pembentukan Southern Borders Provinces Administrative Center (SBPAC) yang memungkinkan elit-elit lokal mengatur administrasinya sendiri dan menjaga budaya di Thailand Selatan. Program kedua adalah Civil-Police-Military Patrol (CPM-43) yang berfungsi sebagai kontrol keamanan agar tidak terjadi extra judicial killing. Tahun 1990-an, Muslim menjadi mayoritas pemegang kekuasaan di majelis legislatif provinsi di Thailand Selatan dan menjadi Mayor di setiap kota madya sehingga terdapat perpecahan di kelompok pemberontak antara BRN dan PULO. Konflik muncul lagi pada tahun 2004 sebagai hasil kebijakan Thaksin Sinawatra yang menghapuskan SBPAC dan CPM-43, dan malah mendeklarasikan status Darurat Operasi Militer tahun 2005 di Thailand Selatan Penghapusan kedua institusi tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dari Thaksin beserta partainya yang mencoba mengganti dominasi Partai Demokrat dengan mendeklarasikan bahwa konflik di Thailand Selatan bukanlah masalah politis namun masalah kriminalitas dan keamanan.⁷⁴

⁷³ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

⁷⁴ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

Proses perlawanan elit-elit lokal atau cara memobilisasi massa dapat dijelaskan dengan pendekatan konstruktivisme dengan pemilihan identitas yang mencolok 'salient' 'master cleavage' dari berbagai identitas yang ada yang kemudian dimasuki oleh 'master narrative' untuk membakar semangat dan kebencian (Varshney 2009, p. 287). Posner menjelaskan pemilihan identitas yang mencolok ini lebih mudah didapat bila identitas yang dipilih relatif sama atau lebih besar daripada wilayah dan total populasi di tempat terjadinya kontestasi politik (2004). Terdapat 80% Muslim tinggal di ketiga provinsi di Thailand Selatan dibandingkan Buddha yang hanya 22%. Dari total penduduk 2,777,542, 75% adalah etnis melayu. Dengan data ini, maka identitas Melayu-Muslim merupakan identitas mayoritas.⁷⁵

Merujuk pada tulisan Panggabean (Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan) yaitu bukan perbedaan identitaslah yang menyebabkan konflik namun konfliklah yang mempertegas adanya perbedaan etnik tersebut. Setidaknya terdapat dua contoh fenomena yang menjadi basis penguatan identitas Melayu dan Muslim: (1) proses asimilasi yang berwujud pelarangan bahasa Patani dan agama Islam telah memberikan kesan bahwa keberlangsungan umat Islam di Patani terancam; dan (2) adanya penembakan 150 umat muslim di Masjid Kru Se dan penangkapan demonstran Muslim pada protes di Kantor Polisi Tak Bai Penguatan identitas agama ini dicerminkan melalui penggunaan atribut keagamaan dalam pergerakan mereka dan ideologi yang diusungnya. Sebagai contoh, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP) diubah menjadi Barisan Islam Pembebasan

⁷⁵ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

Patani, dan tahun 1995 dibentuk Patani Islamic Mujahedeen Movement oleh Muslim relawan perang Afghanistan.⁷⁶

Konflik kekerasan di Thailand Selatan tidak berjalan konstan. Dinamika konflik ini dipengaruhi oleh respon dari Pemerintah Pusat. Thailand Selatan merupakan basis pendukung dari Partai Demokrat sejak tahun 1975-2005. Akibatnya, baik pada masa Pemerintahan Chuan Leekpai dan Abhisit Vejjajiva tetap mempertahankan institusi SPBAC, CPM-43, beserta constructive engagement dengan penduduk Thailand Selatan. Walaupun institusi SBPAC dan CPM-43 adalah karya Prem Tinsulanonda, namun Ia berasal dari militer dan tidak membutuhkan dukungan dari rakyat untuk dapat menjadi Perdana Menteri. Pada masa dominasi dan pemerintahan Partai Demokrat, tingkat konflik kekerasan di Thailand Selatan cenderung menurun. Setelah berakhirnya Pemerintahan Chuan Leekpai tahun 2001 dan digantikan dengan Thaksin, insiden kekerasan naik dari 50 di tahun 2001 menjadi 75 di tahun 2002 dan 119 di tahun 2003.⁷⁷

Korelasi menurunnya konflik kekerasan dengan sikap akomodatif dari Partai Demokrat terhadap penduduk Thailand Selatan dapat dijelaskan dengan pendekatan institusionalisme terutama terkait dengan pemilu. Dalam kasus ini, Pemerintah Partai Demokrat menerapkan otonomi (federalisme) yang artinya kekuatan lokal dapat menentukan pemerintahannya dengan minimum ketetapan yang ditekan dari pemerintah pusat. Artinya, dalam masa tersebut lokal elit mampu menjalankan pemerintahannya dengan basis agama Islam dan penghormatan terhadap budaya Melayu. Wilkinson (2004) menambahkan korelasi

⁷⁶ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

⁷⁷ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

pemerintah mau melindungi minoritas dan granting their rights karena sistem demokrasi memungkinkan terjadinya vote-pooling dimana partai politik bergantung pada suara minoritas (support base) untuk memenangkan pemilu. Hal ini terjadi pada Partai Demokrat di Thailand Selatan pada Pemilu 2011 yang mendapatkan 9 dari 11 kursi.⁷⁸



0

⁷⁸ Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

merupakan suatu pemikiran dan tindakan yang menunjukkan cinta terhadap bangsa dan negara serta kesedaran nasional yang meliputi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan keagamaan bahkan ingin keluar dari suatu penguasaan asing dalam mengekalkan identitas juga nilai-nilai kebangsaan. Sungguhpun cengkaman pejajahan Siam (Thailand) ke atas negeri Melayu Patani di (Selatan Thailand) mencapai usia 241 tahun tetapi gelaran Nasionalisme moden Islam Patani hanya wujud selepas berakhirnya perang dunia 2. Walaupun nasionalisme wujud dengan seriusnya di Asia Tenggara dalam Abad ke 20 ini namun semangat patriotisme telah lama terpendam.

Sekarang telah menjadi Provinsi Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Provinsi Songkla di Selatan Thailand. Tambahan pula masyarakat Islam berketurunan Melayu di wilayah-wilayah Patani (Selatan Thailand) merasakan kehilangan hak-hak politik dan pentadbirian secara menyeluruh bersama dengan perbezaan ciri-ciri Penghidupan masyarakat Islam. 85% dari pada jumlah penduduk wilayah berkenaan telah dicabar dengan tekanan hebat oleh unsur-unsur Siam (Thailand) dan agama Buddha. Seajar dengan pencapaian arus kemerdekaan di kalangan penduduk di negara-negara Asia Tenggara yang sedang memuncak telah memberikan aspirasi baru kepada golongan Nasionalisme.

Konflik antara Muslim Melayu Patani dengan pemerintahan Siam dimulai sejak perjanjian Anglo-Siamisasi, yakni perjanjian mengenai perbatasan wilayah

kekuasaan antara pemerintahan kolonial Inggris dan Siam-Thailand. Selain itu, konflik juga disebabkan oleh adanya pengabaian terhadap kultural budaya leluhur masyarakat Muslim Melayu Patani yang berbeda dua lintas budaya, yaitu budaya dari komunitas Melayu-Islam dan Siam Buddha.

Haji Sulong termasuk dalam kelompok ulama yang memimpin reformasi agama dan gerakan nasionalis di Malaya dan Indonesia pada dekade pertama abad ke-20. Di bidang keagamaan, dua kegiatan penting yang pernah dilakukan oleh Haji Sulong. Pertama, kegiatan mengajar secara bertabligh dan kedua, upayanya dalam membela hukum Syariah, dan di politik Haji Sulong yang terlibat dalam perjuangan memperbaiki nasib umat Islam Patani. Sebuah perjuangan yang menyempurnakan karir hidupnya meskipun upaya ini tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand. tetapi memberikan kontribusi besar bagi perjuangan umat Islam Patani di masa depan.

Namun semua ini hanyalah sejarah dan sudah lama dilupakan. Banyak kelompok gerakan Melayu Patani yang sudah mulai aktif gerakan bersenjata, politik dan sosial, paling tidak, Perjanjian itu merupakan api yang semakin membara akan ketidakadilan yang terus mereka rasakan. “Perjanjian Anglo-Siamese tahun 1909 adalah sejarah. Namun, efeknya berlanjut dan tetap sampai hari ini. Baik Inggris Malaya dan Siam membuat keputusan mengabaikan penguasa Melayu Patani dan orang-orang di kedua sisi perbatasan. Itu dipaksakan oleh persuasi, intimidasi dan penggunaan kekuatan. Fakta bahwa orang-orang Melayu Patani di pedalaman Selatan masih memperjuangkan hak-hak mereka, keadilan dan kebebasan sampai hari ini hanya menegaskan bahwa Perjanjian

1909 memang merupakan “tragedi” dan mimpi buruk yang berkelanjutan bagi mereka.

Upaya kontestasi dan negosiasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik identitas Muslim Melayu Patani di Thailand Selatan adalah dengan cara melakukan dialog yang difasilitasi oleh lembaga OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan juga PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa atau dikenal dengan nama lain *Unitions Nation*). Beberapa resolusi yang ditawarkan oleh pemerintahan Siam (*affirmative action*) di antaranya adalah pemberian otonomi hukum Islam, seperti *Chalarajmontri* dan pendirian sekolah agama Islam walaupun masih belum ada payung hukum yang jelas.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengemukakan beberapa saran agar dapat dipertimbangkan dan diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

Diharapkan kepada masyarakat Patani pada umumnya yang ada di Thailand Selatan, terutama di tiga wilayah yang masih terjadi pertikaian antara pemerintahan Siam agar lebih mencintai budaya Melayu dan juga saling bertoleransi terhadap budaya-budaya asing, serta dan saling berinteraksi secara harmonis. Diharapkan juga agar tidak melakukan pengeboman, penembakan baik di pihak pemerintahan Siam maupun di pihak kalangan masyarakat Patani yang terlibat dalam kasus gerilya.

Diharapkan pada masyarakat Patani untuk menikmati jalannya proses perdamaian agar tidak menimbulkan masalah baru yang berujung pada kekerasan.

Diharapkan pada pemerintah Siam untuk tidak mencurigai lembaga-lembaga lokal yang melakukan reinternalisasi, baik itu pondok pesantren, tadika, dan LSM lainnya, bahkan sebenarnya guru-guru Melayu tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Begitu pula dengan masyarakat Patani diharapkan agar tidak mencurigai kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan di tengah masyarakat Patani.



DAFTAR PUSTAKA

- Sejarah Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PERMAS) Thailand selatan pada tahun 2008-2017.
- Diskusi pemikiran Tuan Guru Haji Sulong, Kilauan Permata Pattani telah didiskusikan di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur (DBPWT), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia tanggal 9 Januari 2016 lalu.
- Muhammad Reza Ilham Taufani, CNBC Indonesia 05 September 2023 10:25.
- Buku Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek.
- Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No.1 Tahun 2017.
- Studi Multidisipliner Volume 8 Edisi 2 2021.
- JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol 2. No.2 Juli 2020.
- Diplomasi Nahdlatul Ulama Dalam Menangani Konflik Antara Pemerintah Thailand dengan Muslim Patani Tom Finaldin, Muhammad Rifki Ihwannudin Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari Bandung.
- Diskusi pemikiran Tuan Guru Haji Sulong, Kilauan Permata Pattani telah didiskusikan di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur (DBPWT), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia tanggal 9 Januari 2016.
- Esai Akademik, Politik dan Hubungan Internasional, Sejarah dan Budaya 29 Januari 2020.
- JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol 2. No.2 Juli 2020.
- Journal (PNJ),1(2),74.<https://doi.org/10.30602/pnj.v1i2.292>.
- Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh 26-03-2026.
- Origins of Malay Muslim “Separatism” in Southern Thailand Diarkibkan 2012-06-07 di Wayback Machine.
- Patani Malay Minority, Rights and Identity, Thailand.
- Sejarah dan Perkembangan Konflik Gerakan Separatisme Aceh. (2024).

Artikel terkait konflik sosial atau tulisan lainnya dari Versatile Holiday Lado 2021.

Skripsi Ummuaiman Maming (2024) (“Modernisasi Pendidikan Islam Perpektif Ulama Patani : Kajian Pemikiran Haji Sulong 1895-1954”).

Republika.Co.Id, Jakarta Kamis 23 Mar 2017.

"Inventori Vokal Dialek Melayu Kelantan: Satu Penilaian Semula". Jurnal Linguistik (in Malay). 11: 1–19. Archived from the original on 15 July 2024.

The Federation of Patani Students and Youth (PerMAS), <http://www.turanisia.com/declaration-thai-states-conduct-continuation-human-rights-violations-prejudices-discrimination-towards-people-patani/> diunduh 20 Oktober 2016.

Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 1(1),1–15. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.438> 2018-01-04.

Sejarah Dan Kondisi Terkini Umat Melayu Muslim di Patani. Oleh : Turanisia.Com, Abu Muhammad Faton, 15 September 2016.

Skripsi Mr. Furkon Chema (2017) (“Gerakan Perlawanan Patani United Liberation Organization (PULO).

Jurnal Abdulfatta Jeh-Ngoh (2021) (“Muhammad Bin Abdul Kadir; Perjuangan; Pengabdian”).

buku Handbook Resolusi Konflik: Teori dan Praktek.

